

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data panel persamaan regresi sederhana dengan metode fixed effect diketahui bahwa tingkat kemandirian 19 kabupaten/kota serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Pasca otonomi daerah periode 2007-2017 maka dapat disimpulkan beberapa hasil sebagai berikut:

1. Pertumbuhan PAD kabupaten/kota di Sumatera Barat dalam kurun waktu 2007-2017 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun peningkatan realisasi PAD tersebut tidak memberikan dampak terhadap rasio desentralisasi fiskal masing-masing daerah karena berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rasio PAD terhadap penerimaan daerah menemukan hasil bahwa tingkat kemandirian daerah di 19 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat masih berada dibawah 25% yang berarti bahwa kemampuan keuangan daerah masih tergolong sangat rendah. Pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah tergolong instruktif atau dengan kata lain peran pemerintah pusat masih sangat besar terhadap pengelolaan keuangan daerah Sumatera Barat. Kontribusi pertumbuhan angka PAD dari masing-masing daerah pada setiap tahunnya ternyata belum dapat menghasilkan tingkat kemampuan keuangan yang tinggi.
2. Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat Pasca pelaksanaan otonomi daerah (2007-2017) selalu mengalami peningkatan

setiap tahunnya kecuali pada tahun 2009 dimana perekonomian dimasing-masing kabupaten/kota mengalami penurunan yang disebabkan karena pada tahun 2009 terjadi bencana gempa bumi yang mengakibatkan kegiatan perekonomian menjadi tidak stabil. Kota Padang tetap menjadi barometer perekonomian Sumatera Barat dengan nilai total PDRB tertinggi dibanding kabupaten/kota. Namun jika dilihat dari persentase rata-rata pertumbuhan ekonomi terlihat bahwa kota Payakumbuh memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi diantara kabupaten/kota yang ada. Jika dilihat secara keseluruhan sejak pelaksanaan desentralisasi fiskal terjadi ketimpangan antar wilayah dimana pertumbuhan ekonomi kota Padang tumbuh lebih besar dibanding kabupaten/kota lainnya .

3. Berdasarkan hasil persamaan regresi didapat nilai signifikansi dari rasio derajat desentralisasi fiskal sebesar 0,0004 dimana nilai tersebut kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat kemandirian daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

6.2 Saran

Sampai saat sekarang ini belum ditemukan hubungan yang jelas antara pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi fiskal karena telah banyak studi yang membahas hubungan kedua variabel tersebut namun belum mendapatkan titik temu karena hasil dari masing-masing study belum menemukan hubungan yang jelas. Dimana sebagian peneliti mengatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan sebagian lagi mengatakan memiliki hubungan negatif dan bahkan tidak

terdapat hubungan antara keduanya, sehingga saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Pemerintahan daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus terus berupaya untuk terus meningkatkan besaran realisasi pendapatan asli daerah melalui pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah yang meliputi hasil pajak, restribusi daerah, dan sumber kekayaan lainnya sehingga rasio tingkat kemandirian daerah di 19 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat dapat ditingkatkan agar nantinya pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah tidak bersifat instruktif lagi dalam artian bahwa peran pemerintah pusat terhadap keuangan daerah menjadi tidak besar lagi sehingga nantinya output yang dihasilkan dari penyelenggaraan desentralisasi fiskal ini semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2. Perlunya peningkatan kemampuan SDM yang berwenang sehingga nantinya keputusan-keputusan ditingkat lokal atau daerah baik dalam perencanaan anggaran maupun strategi penyerapan anggaran sudah berjalan secara progresif atau dengan kata lain keputusan-keputusan tersebut dapat menciptakan efisiensi pembangunan yang berujung pada pertumbuhan ekonomi daerah.

